

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang tidak ditangani dengan benar bisa membuat dampak negatif seperti hilangnya estetika, sumber penyakit, mencemari air, tanah, dan udara (Rahmawati, 2021). Permasalahan sampah dapat teridentifikasi dengan cara melihat jumlah sampah yang dibawa ke TPA.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, pengelolaan sampah yang berjalan di Indonesia belum sesuai prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sehingga mengakibatkan berbagai dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Pada tahun 2023 Indonesia memproduksi 17,4 juta ton timbulan sampah dengan rincian 11,6 juta ton sampah terkelola atau sebesar 66,47% dan 5,8 juta ton atau 33,53% sampah tidak terkelola. Data tersebut berasal dari 128 Kabupaten dan kota yang dikelola oleh sistem informasi pengelolaan sampah nasional (data.goodstats.id).

Sistem pengelolaan sampah berbagai daerah di Indonesia masih banyak menggunakan konsep *end-of-pipe*, timbulan sampah sekadar dipindah dari berbagai tempat ke TPA. Sistem lama tersebut ternyata belum bisa menjadi solusi permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan masih terus saja terjadi. Selain hal tersebut,

pengelolaan sampah di Indonesia masih mengalami tantangan pada penerapan strategi dan penegakan peraturan sehingga strategi tidak bisa berjalan dengan semestinya. Di sisi lain masyarakat memiliki peran besar dalam pengelolaan sampah, kepedulian masyarakat pada hal ini dipandang masih rendah terutama masyarakat yang menghasilkan limbah yang perlu diolah kembali sebelum dibuang. Tingginya biaya yang dikeluarkan membuat masyarakat yang memiliki usaha enggan melakukan pengelolaan limbah (Batahari dkk., 2023).

Konsep *end-of-pipe solution* yang berjalan hingga saat ini diperparah dengan sistem TPA yang ada, sampah hanya dibuang tanpa proses apa pun dalam suatu tempat. Dampak dari sistem tersebut adalah pencemaran air tanah karena masuknya cairan lindi, tumpukkan berbagai jenis sampah menyebabkan timbulnya berbagai gas berbahaya yang bisa menyebabkan terjadinya ledakan atau kebakaran. Pada tahun 2023 dalam jangka waktu tiga bulan sebanyak tiga puluh TPA terbakar, TPA Rawa Kucing di Kota Tangerang adalah salah satu TPA yang terbakar dan membutuhkan waktu empat hari pemadaman. Kebakaran TPA menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam mengelola sampah (Katadata, 2023). Pemerintah harus memastikan semua pihak agar bertanggung jawab sesuai dalam peraturan yang sudah tertera kemudian menjalankan strategi yang sudah dirancang agar masalah ini tidak terus-menerus berdampak pada kesehatan, ekonomi, maupun kehidupan sosial masyarakat.

Peraturan mengenai pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97/2017 Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres

Jakstranas). Kebijakan pengelolaan sampah pada peraturan tersebut menargetkan 100% sampah terkelola dengan rincian 30% pengurangan dan 70% pengelolaan dengan batas waktu 2025. Usaha mencapai target tersebut dilakukan dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir.

Permasalahan pengelolaan sampah dialami oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sampah yang masuk ke TPA Piyungan berkisar 630 hingga 650 ton per hari (DPRD DIY, 2020). Permasalahan sampah yang dahulu tidak berdampak langsung membuat masyarakat sering kali tidak peduli dengan isu penuhnya TPA Piyungan. Penanganan sampah *end-of-pipe* mengakibatkan Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta selalu terdampak apabila terdapat permasalahan di TPA Piyungan.

Tabel 1.1 Data Penutupan TPA Piyungan

Tahun	Tanggal Penutupan	Lama Penutupan
2023	23 Juli	45 Hari
2022	21 Oktober	2 Hari
	7 Mei	5 Hari
	18 Maret	3 Hari
2021	9 Maret	2 Hari

Sumber: Telah diolah kembali

Zona eksisting TPA Piyungan yang disediakan sebagai tambahan tempat membuang sampah sudah melebihi kapasitas. Penutupan kembali terjadi di TPA Piyungan selama 45 hari, penutupan tersebut sudah disepakati oleh masing-masing sekretariat daerah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, hal tersebut dikatakan oleh Sekda DIY Beny Suharsono.

“Penutupan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan rapat Sekda DIY dengan Sekda Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Jogja. Kesepakatan tersebut dikarenakan lokasi zona eksisting TPA Regional Piyungan yang sudah penuh dan melebihi kapasitas” (Tribun Jogja, 2023).

Berdasarkan data Pemda DIY dalam Harian Jogja (2023) total volume sampah yang berasal dari Sleman sejak Januari hingga Juni 2023 berada di angka 53.096 ton (slemankab.go.id). Volume sampah per hari pada tahun 2019 mencapai 793,25 ton dengan pengelolaan persampahan sebesar 37,66%, yaitu pengurangan sampah sebesar 4,68% dan penanganan sampah sebesar 32,98%. Sehingga masih terdapat *gap* cukup banyak jika melihat target Jakstrada, yaitu sebesar 64,02 (Renstra DLH 2021-206).

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki strategi pengelolaan sampah yang tercantum pada Perbub Sleman Nomor 33.2 Tahun 2018. Peraturan tersebut berisi penjelasan kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah. Pedoman dalam membuat peraturan berasal dari wilayah yang lebih tinggi dengan tujuan terjadi keselarasan. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Peraturan tersebut juga menjelaskan penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Tabel 1.2 Strategi pengurangan dan penanganan sampah

STRATEGI	
Pengurangan	Penanganan
a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam

Sampah	penanganan Sampah
b. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat
c. Penguatan komitmen antar lembaga dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah	c. Penguatan komitmen antar lembaga dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah
d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia
e. Pembentukan sistem informasi	e. Pembentukan sistem informasi
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)
g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan
h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	h. Penguatan penegakan hukum
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sumber: Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2018

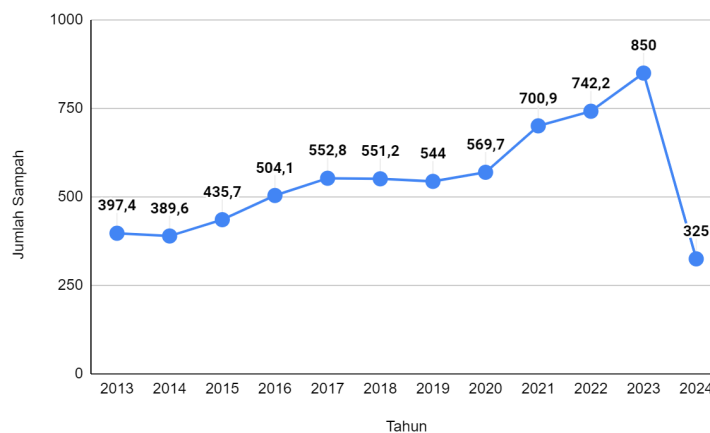
Salah satu program yang diturunkan dari strategi tersebut adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM) yang bertujuan melibatkan

masyarakat pada pengurangan sampah dengan membentuk kelompok pengelola sampah mandiri (KPSM). Sampai dengan 2020, sudah tersebar 147 lokasi KPSM di Kabupaten Sleman. KPSM tersebut terdiri dari bank sampah, sedekah sampah, TPS3R dan berbagai pengelola sampah mandiri lainnya. Jumlah tersebut masih perlu lebih ditingkatkan lagi dan perlu penyebaran yang merata pada setiap wilayah tingkat kecamatan dan kalurahan. Tidak tersedianya database yang update menyulitkan pemetaan dan perkembangan di tiap wilayah (Putra dkk, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Setianingrum (2022) disebutkan bahwa tiga TPS 3R besar di Kabupaten Sleman masih menyumbang lebih dari 60% sampahnya ke TPA Piyungan.

Penelitian yang dilakukan Paulus Melki dan Supardal dengan sasaran penelitian Desa Kalasan, Sukunan, dan Tlogoadi dipaparkan bahwa DLH melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dengan beberapa cara sosialisasi pada masyarakat, program bank sampah, TPST, dan pengumpulan sampah langsung pada perorangan. Dalam rangka menjalankan program pengelolaan sampah, pemerintah dan masyarakat memiliki beberapa hambatan. Kurangnya kepedulian masyarakat, keterbatasan dana, sarana dan prasarana menjadi hambatan dari sisi Jaringan Mandiri Pengelolaan Sampah (JPSM), sementara DLH yang merupakan *stakeholders* lain memiliki hambatan pada kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidaktaatan terhadap informasi selain itu luasnya wilayah yang dijangkau juga menjadi masalah (Osok dan Supardal, 2023).

Pengelolaan sampah kemudian dilanjutkan pada proses penanganan sampah. Proses penanganan sampah sangat bergantung dari awal sampah

dikumpulkan, pemilahan sampah dari sumbernya sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penguatan keterlibatan masuk dalam strategi penanganan dengan cara melakukan komunikasi, pemberian informasi dan edukasi. Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh unit pelaksana teknis dalam melaksanakan teknis pelayanan sampah. UPT memiliki tugas melakukan pelayanan persampahan seperti pengangkutan, pembuangan, layanan kebersihan, pemeliharaan sarana prasarana, dan penarikan retribusi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2022 DLH Kabupaten Sleman menekankan masalah sampah harus diselesaikan secara mandiri dari sumber sampah hingga pemrosesan akhir.

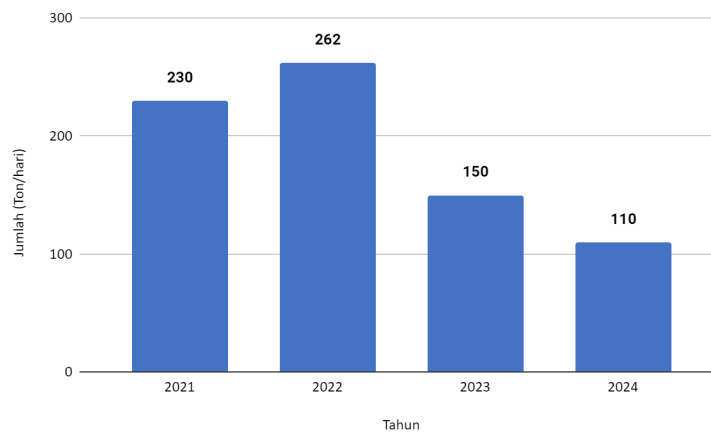


Gambar 1.1 Volume Sampah Masuk TPA Piyungan (ton/hari)

Sumber: Perupadata

Daya tampung sampah per hari di TPA Piyungan makin turun, sejalan dengan penuhnya kapasitas yang tersedia kuota pembuangan sampah Kabupaten Sleman juga menjadi terbatas. TPA piyungan dibuka kembali secara terbatas pada 6 September 2023, kuota yang didapatkan belum sepenuhnya bisa menampung seluruh sampah di Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman mendapatkan kuota

sebesar 110 ton per hari atau lebih sedikit 40 ton dibandingkan sebelumnya (Kompas.com, 2024).



Gambar 1.2 Kuota sampah Kab. Sleman di TPA Piyungan (ton/hari)

Sumber: Telah diolah kembali

Dinas Lingkungan Hidup sangat paham akan masalah penanganan sampah di Kabupaten Sleman, ketergantungan pada TPA Piyungan akan selalu menjadi catatan setiap akhir tahun. Hal tersebut terbukti karena pada tahun 2024 permasalahan sampah kembali diserahkan di masing-masing daerah akibat penutupan TPA Piyungan. Pemerintah Kabupaten Sleman tidak bisa melakukan penanganan yang sudah berjalan sebelumnya karena adanya permasalahan ini.



Gambar 1.3 Sampah berserakan di pinggir Jalan Kabupaten

Sumber: Twitter @kabarsleman

Dalam kurun waktu penutupan TPA Piyungan permasalahan sampah muncul kembali ke permukaan, masyarakat menjadi resah karena tidak tahu akan membuang sampah kemana. Pihak swasta yang biasa menyediakan jasa pengambilan sampah tidak beroperasi akibat penutupan TPA, beberapa masyarakat memilih cara instan dengan membuang sampah di pinggir jalan dan sungai. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak nyaman karena menimbulkan bau, jika tidak segera diselesaikan permasalahan sampah bisa menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat (radarjogja.jawapos.com, 2023).

Dengan adanya permasalahan yang mendesak seperti saat ini, rencana jangka pendek diperlukan untuk mengurangi efek negatif terutama penumpukkan

sampah. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, penting dilakukan satu penelitian untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah. Penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sleman”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penjelasan tentang kondisi pengelolaan sampah yang sebelumnya sudah dilakukan menghasilkan beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Pelayanan pengelolaan masih 64,02%
2. Penanganan sampah masih mengandalkan TPA Piyungan
3. Keterbatasan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada pengelolaan sampah
4. Rendahnya kepedulian masyarakat pada permasalahan sampah
5. Strategi penanganan sampah yang dijalankan belum optimal

1.3 Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang sudah teridentifikasi disimpulkan dalam tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi lingkungan internal pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kondisi lingkungan eksternal pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman?

1.4 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang sudah ditetapkan menjadi dasar dalam tujuan yang akan dicapai setelah keseluruhan kegiatan ini dilakukan, berikut tiga tujuan tersebut:

1. Mengidentifikasi lingkungan internal pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
2. Mengidentifikasi lingkungan eksternal pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
3. Merumuskan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

Tulisan ini merupakan partisipasi penulis pada permasalahan yang diangkat, hasil tulisan ini semoga bisa bermanfaat kepada semua pihak.

1. Manfaat Akademis

Penelitian yang dilakukan bisa dijadikan sebagai tempat belajar menyusun karya ilmiah dengan pedoman yang sudah didapat sebelumnya oleh peneliti di masa kuliah. Lebih luas lagi, peneliti berharap bisa mendorong perhatian masyarakat pada pengelolaan sampah khususnya di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian yang dilakukan bisa berpartisipasi pada pengembangan ilmu administrasi publik terutama untuk bahan kajian penelitian dalam bidang sampah di Kabupaten Sleman serta bermanfaat untuk mengupayakan peningkatan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam mengelola sampah. Tulisan ini juga diharapkan menjadi pemantik semua

stakeholders yang berpengaruh pada permasalahan pengelolaan sampah ikut berpartisipasi secara maksimal demi kepentingan ke depan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan bisa berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan sampah yang ada dengan beberapa strategi yang sudah dirumuskan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoretis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Indra Lesang dan Juwita Lalopa (2022) melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui strategi pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Morotai dalam mengatasi permasalahan sampah. Diketahui dalam penelitian ini DLH Kabupaten Pulau Morotai tidak maksimal dalam menjalankan strategi pengelolaan sampah. DLH belum melakukan dasar pengelolaan, yaitu melakukan pemilahan, pemanfaatan kembali dan pemrosesan akhir yang sesuai. Kondisi sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan.

Penelitian lain dengan judul “Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Model Sirkular di Wilayah Perkotaan Purwokerto” ditulis oleh Purwono Purwono, Wiwiek Rabiatal, Edy Suyanto (2022). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, peneliti memiliki tujuan untuk melihat implementasi strategi model sirkular yang digunakan dalam pengelolaan sampah skala rumah tangga di

Kota Purwokerto. Diketahui dalam penelitian ini pelaksanaan strategi yang dilakukan sudah berjalan optimal karena komitmen pemangku kebijakan belum sepenuhnya kuat, belum terdapat sinkronisasi dan lemahnya penegakan hukum. Perlu dilakukan sinkronisasi kerja sama antara *stakeholders* baik pihak swasta atau masyarakat.

Penelitian serupa dilakukan Indah Wahyu Maesarini, Dodi Rahmat Setiawan, Maya Puspita Dewi (2020) dengan judul “Strategi Gerebek Sampah Pemerintah Kota Depok Menuju Kota Bebas Sampah Tahun 2020”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui berbagai strategi Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi permasalahan sampah. Diketahui dalam penelitian ini Pemerintah Kota Depok lewat DLHK sudah bekerja dengan maksimal salah satunya bisa dilihat dari adanya beberapa strategi baru untuk menangani permasalahan sampah. Permasalahan yang ada membutuhkan TPA tambahan, kerja sama dengan *stakeholders* lain, pembuatan program lebih banyak, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Berbeda dengan penelitian di atas Niluh Eka Puri Setiawandari dan Arimurti Kriswibowo (2023) melakukan penelitian tentang kolaborasi dalam mengelola sampah dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kerja sama yang dilakukan oleh semua pihak dalam TPST SAMTAKU. Peneliti akan melihat kolaborasi yang terjadi kemudian dianalisis menggunakan model tata kelola

kolaboratif milik Ansell & Gash (2008). Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa kolaborasi yang ada dalam pengelolaan TPST SAMTAKU telah berjalan cukup optimal. *Collaborative governance* yang telah dibentuk dijalankan sehingga manfaatnya bisa terlihat.

Primus Mukus, Amaliatulwalidain, M. Qur'anul Kariem tahun 2023 melakukan penelitian dengan judul “Strategi *Collaborative Governance* Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022” menggunakan metode kualitatif. Tujuan yang ingin didapat setelah melakukan penelitian, yaitu mengetahui strategi yang digunakan dalam pengelolaan sampah Desa Tulung Selapan Timur tahun 2022. Peneliti akan melihat kolaborasi yang terjadi kemudian dianalisis menggunakan model tata kelola kolaboratif milik Ansell & Gash (2008). Peneliti menemukan kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan sampah berjalan dengan baik. Pemerintah membuat program dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, pihak swasta melaksanakan sesuai dengan semestinya, masyarakat berpartisipasi dalam program yang ada.

Penelitian serupa dilakukan oleh Devita Rizqi Hidayanti dan David Efendi dengan judul “Praktik *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kerja sama yang dilakukan oleh semua pihak dalam TPA Piyungan. Peneliti akan melihat kolaborasi yang terjadi dengan membandingkan dengan delapan komponen, peneliti juga akan menggunakan teori ekologi politik dalam melihat dampak yang terjadi pada

masyarakat. Peneliti menemukan kerja sama yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dalam pemenuhan indikator konflik lingkungan dan munculnya gerakan sosial.

Penelitian tentang bagaimana merumuskan strategi baru dilakukan Lia Kusumaningrum, Kiki Dwi Wulandari, Faradilah Farid Karim, Nurika Arum Sari (2023) dengan judul “Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk merumuskan strategi yang bisa mengurangi sampah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang ada. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal setelah didapat berbagai strategi selanjutnya dilakukan uji litmus. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa Dinas PKPLH melakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sampah sebagai salah satu strategi. Pelayanan pada masyarakat juga ditingkatkan dengan memperbaiki dan menambah sarana prasarana pengelolaan sampah.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Wieky Rusmanto (2022) melakukan penelitian dengan judul strategi “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soreang Kabupaten Bandung dan hambatan dalam mengelola sampah. Diketahui dalam penelitian ini Kabupaten Bandung tidak memiliki TPA sendiri, DLH

memiliki program pokasi, LCO, dan bank sampah. Kelemahan dalam pengelolaan sampah adalah pemilihan yang belum maksimal, salah satu langkah penanganannya adalah menjadikan sampah memiliki nilai ekonomi. DLH Kabupaten Bandung harus mengikuti perkembangan teknologi dalam pengelolaan sampah, selain itu perlu kerja sama dengan pihak lain di luar pemerintahan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Bella Wanda Anastasia dan Lukman Arif (2022) dengan judul “Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Mojokerto dalam Perspektif Analisis *strengths, opportunities, aspirations, results*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Peneliti kemudian menganalisis menggunakan model analisis SOAR milik Stavros & Hinrich (2009). Setelah penelitian dilakukan diketahui bahwa beberapa aspek seperti kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi yang terjadi sudah dilakukan sebaik mungkin, aspek operasional tidak bisa berjalan dengan semestinya karena pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dian Irmawati dan Dwi Harsono melakukan sebuah penelitian dengan tujuan menganalisis bagaimana proses manajemen strategis yang terjadi pada pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dengan judul “Manajemen Strategis Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, setelah penelitian dilakukan diketahui bahwa secara keseluruhan proses manajemen strategi yang dilaksanakan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah berjalan optimal, tetapi masih menemui kendala dalam pelaksanaannya. DLH membutuhkan sumber daya yang lebih baik, kemudian sarana dan prasarana harus ditingkatkan, selanjutnya implementasi dijalankan dengan maksimal, terakhir perlu dilakukan evaluasi khusus terkait permasalahan yang terjadi.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Tujuan	Teori	Metode	Hasil
1	Indra Lesang, Juwita Lalopa (2022).	Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.	Implementasi.	Kualitatif	Strategi yang ada belum optimal karena pengelolaan masih sangat sederhana tidak sesuai dengan pola pengelolaan pada peraturan yang ada.
2	Purwono Purwono, Wiwiek Rabiatul, Edy Suyanto (2022).	Mengetahui implementasi pemberdayaan pengelolaan sampah model sirkular dan strategi pengembangannya skala rumah tangga di perkotaan Purwokerto.	Implementasi.	Kualitatif	Strategi yang dihasilkan adalah penguatan peran masyarakat dari pemerintah daerah.

3	Indah Wahyu Maesarini, Dodi Rahmat Setiawan, Maya Puspita Dewi (2020).	Mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menangani permasalahan sampah.	Implementasi Program.	Kualitatif	Diperlukan adanya beberapa perbaikan dalam pengelolaan sampah di Kota Depok karena pertumbuhan penduduk yang ada.
4	Niluh Eka Puri Setiawandari, Arimurti Kriswibowo (2023).	Mengetahui bagaimana proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terjadi di TPST Sampah Tanggung Jawabku.	Collaborative governance Ansell & Gash (2008).	Kualitatif	Tata kelola kolaboratif di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash.
5	Primus Mukus, Amaliatulwaidain, M. Qur'anul Kariem (2022).	Mengetahui Bagaimana Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2022.	Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash.	Kualitatif	Program kolaborasi saat ini telah berhasil dan mampu dijalankan hal ini dapat dibuktikan dari tersedianya berbagai fasilitas pengelolaan sampah.
6	Devita Rizqi Hidayanti, David Efendi (2020).	Mengetahui bagaimana praktik <i>collaborative</i>	<i>Collaborative Governance</i> .	Kualitatif	Praktik <i>collaborative governance</i> masih kurang efektif

		<i>governance</i> yang dilakukan DLHK untuk mengelola sampah di TPA Piyungan.			dilihat dari dua indikator teori yang tidak terpenuhi.
7	Lia Kusumaningrum, Kiki Dwi Wulandari, Faradilah Farid Karim, Nurika Arum Sari (2023).	Memberikan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat menekan timbulan sampah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.	Analisis SWOT.	Kualitatif	Strategi yang diperlukan adalah perubahan cara pandang masyarakat pada sampah, dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
8	Wieky Rusmanto (2022).	Mengetahui bagaimana strategis dan faktor pendukung, penghambat pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang dilakukan DLH Kabupaten Soreang Kabupaten Bandung.	Analisis SWOT.	Kualitatif	Harus dilakukan pengelolaan berbasis teknologi, kemudian melakukan kerja sama dengan pihak lain, sarana dan prasarana pengelolaan berkelanjutan banyak dibangun.

9	Bella Wanda Anastasia, Lukman Arif (2022).	Mengetahui dan mendeskripsikan model analisis Strengths, Opportunities, Aspirations, Results (SOAR) dalam strategi pengelolaan sampah di DLH Kota Mojokerto.	Analisis SOAR dari Stavros & Hinrichs (2009).	Kualitatif	Model SOAR sudah dilaksanakan dalam strategi namun belum optima utamanya pada aspek pembiayaan.
10	Dian Irmawati, Dwi Harsono (2023).	Menjelaskan manajemen strategis pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Magelang.	Manajemen strategis menurut Wheelen dan Hunger (2012).	Kualitatif	Sistem pengelolaan limbah cerdas berbasis teknologi industri 4.0 dengan menggunakan <i>Information and Communication Technology (ICT) and the Internet of Things (IoT)</i> .

Sumber: Telah diolah kembali

Penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana membuat strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dengan mempertimbangan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan SWOT. Dari beberapa artikel ilmiah yang telah dipaparkan sebelumnya diperoleh perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, secara khusus penelitian ini akan merumuskan strategi baru pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

1.6.2 Konsep Administrasi Publik

Chandler dan Plano menjelaskan definisi administrasi publik sebagai cara pejabat publik dan sumber daya yang ada bekerja untuk membuat suatu formulasi yang akan dilaksanakan dan dikelola dengan berbagai peraturan yang tertuang dalam kebijakan publik. Sementara itu, dikemukakan oleh Rosenbloom teori administrasi publik memiliki batasan pada proses manajemen, politik, dan hukum untuk menjalankan pemerintahan pada bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar menjalankan fungsinya pada pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik yang tepat sasaran dengan apa yang terjadi pada masyarakat dan hubungannya dengan masyarakat yang diperintah merupakan batasan administrasi publik sesuai pemahaman Nicholas Henry. Administrasi publik secara teori dikombinasikan dengan praktik untuk mendukung pemahaman tentang peran tersebut. Peran administrasi publik adalah menerapkan agar semua berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Oleh Keban pengertian administrasi publik disederhanakan sebagai gabungan teori dan praktik dalam keseluruhan tahap manajemen ke dalam kehidupan masyarakat terutama terlaksananya nilai-nilai normatif (Yeremias T. Keban, 2008).

Melihat definisi dari beberapa ahli yang sudah dipaparkan sebelumnya, administrasi publik bisa diartikan sebagai kerja sama berbagai pihak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur negara dengan cara mengatur dan menjalankan kekuasaan yang dianggap efektif dan efisien. Hal tersebut berarti administrasi publik memiliki kaitan yang erat pada apa yang

dilakukan pemerintah pada masyarakat. Melihat administrasi publik memiliki cakupan yang cukup luas, permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman yang menjadi fokus penelitian dilakukan bisa menjadi salah satu bagian dari keseluruhan pelaksanaan administrasi publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma sangat penting sebagai suatu landasan dalam menafsirkan suatu fenomena yang ada baik terkait ilmu pengetahuan atau kemajuan peradaban secara global. Hal tersebut diperoleh dengan pada cara pandang, spekulasi, metode, pemikiran dan pendekatan secara mendasar. Jika diartikan secara etimologi paradigma adalah contoh atau model dalam bahasa Yunani. Banyak ahli sepakat bahwa administrasi publik mengalami perkembangan paradigma hingga beberapa kali. Salah satu ahli yang merevisi paradigma administrasi publik adalah Nicholas Henry. Pada awalnya menurut Henry administrasi publik hanya terdapat empat paradigma, kemudian Henry menambahkan dua paradigma lagi seperti disebutkan di bawah:

1. *The Politics-Administration Dichotomy*, (1900 – 1926);
2. *The Principles of Administration*, (1927 – 1937);
3. *Public Administration as Political Science*, (1950 – 1970);
4. *Public Administration as Management*, (1956 – 1970);
5. *Public Administration as Public Administration*, (1970 –sekarang);
6. *Governance*, (1990 – sekarang).

Paradigma *governance* merupakan paradigma terakhir yang berkembang dari awal tahun 1990 hingga saat ini. *Governance* memiliki perbedaan yang mendasar dari pemerintah tradisional. Pemerintah tidak hanya berdiri sendiri sebagai pembuat kebijakan, pelibatan masyarakat dan sektor swasta menjadi hal wajib dalam setiap keputusan yang diambil (Ikeanyibe, 2016). Pemerintah menyadari adanya keuntungan dalam pelibatan pihak lain terutama yang tidak bisa dipenuhi secara sumber daya, pemerintah tetap memegang peranan sebagai pembuat peraturan dan fasilitator. Dibandingkan dengan paradigma yang lain, *governance* memiliki keterkaitan dalam penyelesaian masalah yang ada. Pengelolaan sampah perlu melibatkan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk strategi dengan pelibatan *stakeholders* lain. Pelibatan berbagai pihak dalam mencapai tujuan utamanya di sektor pemerintahan ada dalam paradigma administrasi publik yang terakhir.

1.6.4 Manajemen Publik

Hingga kini terdapat beberapa definisi manajemen sehingga tidak terdapat acuan yang jelas dan disepakati. Definisi manajemen biasanya terkait pada suatu fokus yang dilakukan analisis sehingga menyebabkan perbedaan antara satu dengan lainnya. Salah satu definisi yang sering digunakan dalam konteks administrasi publik menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue. Mereka mengartikan manajemen sebagai pengaturan sumber daya yang ada menuju tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi (Dasar-Dasar Manajemen, 2011: 1).

Overman dalam Keban (2008: 92-93) mengartikan manajemen publik sebagai suatu gabungan berbagai bidang studi pada organisasi secara umum.

Beberapa fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dikombinasikan dengan sumber daya yang dimiliki seperti uang, informasi, manusia. Manajemen publik berarti suatu proses penggerakan sumber daya yang dimiliki suatu lembaga publik seperti yang sudah ada dalam kebijakan. Definisi tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yeremias T. Keban, secara singkat manajemen publik diartikan sebagai manajemen yang berupa pada suatu lembaga pemerintah.

Sedikit berbeda dari dua pengertian sebelumnya Shafritz dan Russel mengartikan manajemen publik sebagai cara bertanggung jawab seseorang saat menjalankan institusi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sampai dengan mencapai tujuan institusi tersebut. Dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan spesifik organisasi publik, tetapi memiliki kedalaman makna yang sama. Fungsi manajemen seperti dijelaskan G.R. Terry dan L.W. Rue sebagai perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengendalian.

Administrasi publik memiliki dua bidang yang tumpang tindih, yaitu kebijakan dan manajemen publik. Manajemen menekankan kepada suatu proses melaksanakan kebijakan yang sudah ada dengan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Hal tersebut sejalan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang pembuatan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dari permasalahan yang ada dengan melakukan analisis lingkungan terlebih dahulu.

1.6.5 Manajemen Strategi

Strategi menurut Bryson adalah segala tindakan yang melibatkan semua sumber daya yang dimiliki, hal tersebut menjelaskan apa yang sedang dikerjakan organisasi dan alasannya. Menurut Hadari Nawawi definisi manajemen strategis adalah seluruh rangkaian proses dalam pengambilan keputusan yang memiliki sifat mendasar dan menyeluruh disertai cara melakukannya, keputusan dibuat oleh manajemen puncak untuk diimplementasikan pada semua pengurus dan anggota dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Baedowi Muhamad, 2022).

Proses perumusan strategi dilakukan dengan berbagai aktivitas dan analisis yang mendalam. Strategi bisa menjadi penentu kondisi organisasi di masa depan sehingga penentuannya tidak boleh berdasarkan tindakan yang tidak logis. Teori yang digunakan adalah teori perencanaan dari John M. Bryson. Teori tersebut bisa digunakan pada berbagai macam organisasi dan instansi pemerintah, pemilihan teori tersebut mempertimbangkan peruntukan teori yang bisa dipakai di berbagai macam organisasi dan lembaga pemerintah. Berikut delapan langkah yang dilakukan dalam proses perencanaan:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
2. Mengidentifikasi mandat organisasi
3. Memperjelas misi dan menilai organisasi
4. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman
5. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Sebuah perencanaan strategis membutuhkan banyak sumber daya sehingga tidak semua tahap bisa dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini akan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal kemudian merumuskan strategi.

1.6.6 Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis adalah bagian yang ada di dalam perencanaan strategis. Fungsinya adalah memosisikan perusahaan pada kondisi yang menguntungkan (David, 2009). Analisis lingkungan yang dilakukan berasal dari internal maupun eksternal menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT memberikan gambaran kondisi perusahaan yang saat ini terjadi dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Tujuan analisis SWOT adalah mengidentifikasikan kekuatan dan kondisi yang memiliki dampak potensial pada formulasi dan implementasi strategi pemasaran perusahaan. Ini merupakan langkah penting atas dasar dua alasan, pertama setiap perubahan dalam lingkungan eksternal bisa menimbulkan dampak serius pada pasar-pasar sebuah perusahaan. Ada dua lingkungan strategis dalam analisis lingkungan, yaitu Lingkungan internal dan Lingkungan eksternal.

1. Lingkungan internal

Lingkungan internal berkaitan dengan unsur-unsur yang berasal dari dalam organisasi yang dapat berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Analisis lingkungan internal dapat dilakukan terhadap hal-hal berikut ini:

A. Visi misi organisasi

Peter Drucker menekankan bahwa tanpa pemahaman mengenai tujuan kita benar-benar akan tersesat, misi memberikan pemahaman mengenai tujuan itu. Selain itu, pemahaman mengenai tujuan akan sangat membantu (kendati tidak selalu perlu atau memungkinkan) untuk memperluas misi itu menjadi "visi keberhasilan". Tanpa visi keberhasilan, para anggota organisasi mungkin tidak cukup tahu mengenai bagaimana memenuhi misi tersebut. Misi, dengan kata lain menjelaskan tujuan organisasi, atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang dilakukannya; visi memperjelas harus menyerupai apa tujuan itu dan bagaimana tujuan harus berjalan agar bisa memenuhi misinya (Bryson, 2016: 112).

B. Sumber Daya Manusia

Werther dan Davis yang dikutip oleh Edy Sutrisno menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Sutrisno, 2009: 1). Sumber daya manusia dapat berupa 2 aspek yang meliputi aspek kualitas yang dapat berupa kemampuan baik fisik maupun nonfisik (skill, pengalaman, kecerdasan, mental, dll) dan aspek kuantitas yang dapat berupa jumlah ketersediaan SDM pendukung keberhasilan pengembangan organisasi (Ambar Teguh S, 2009).

C. Sarana dan prasarana

Moenir mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang

berhubungan dengan organisasi kerja. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi (Sinta, D & Syelviani, M, 2021).

D. Anggaran atau dana

Anggaran merupakan suatu batasan atau suatu patokan yang dipakai dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-hari yang disusun dan dinyatakan dengan angka – angka (bersifat kuantitatif) (Adisaputro Gunawan, 2018). Munandar (2015: 11) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Tempoh dkk., 2021).

2. Lingkungan eksternal

Analisis lingkungan eksternal berkaitan dengan unsur-unsur yang berasal dari luar organisasi yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats), di mana unsur ini cenderung sulit untuk dikendalikan dan memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam lingkungan eksternal dijelaskan di bawah ini:

A. Faktor ekonomi

Menurut Pearce dan Robinson aspek ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi suatu wilayah. Selain itu, tingkat kecenderungan dan belanja

masyarakat harus diperhatikan dalam perencanaan strategi (Sihabudin, 2019: 287).

B. Faktor politik

Salusu mengemukakan aspek politik yang perlu diperhatikan dalam implementasi manajemen strategis adalah perubahan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup dan misi organisasi, undang-undang kepariwisataan, serta stabilitas politik dan pemerintahan. Kecenderungan politik melihat situasi politik yang memengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan menjadi *driving force* terhadap arah setiap kebijakan (Sihabudin, 2019: 287).

C. Faktor sosial budaya

Mardiasmo mengemukakan bahwa terdapat faktor sosial yang penting, yaitu keragaman suku, ras, agama, pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat. Sementara budaya berkaitan dengan kebiasaan, tradisi, nilai-nilai kehidupan masyarakat sekitar yang sudah melekat dan sulit untuk diubah. (Sihabudin, 2019: 287). Koentjaraningrat (1993) mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Sumarto, 2019: 148).

D. Partisipasi dari masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Sumarto adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Palimbunga, 2017: 18). Teori mengenai Partisipasi Masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial (Kalesaran dkk., 2017).

E. Teknologi

Pearce dan Robinson mengemukakan bahwa organisasi harus mencermati pengembangan teknologi untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi (Sihabudin, 2019: 287). Adaptasi teknologi akan membuka kemungkinan terciptanya produk baru maupun perbaikan terhadap prosedur pelayanan. Penggunaan kemajuan teknologi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi terutama dalam pengelolaan data yang menggunakan perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), segala informasi, kemudahan dan kelancaran dalam mengelola serta mengolah kebutuhan untuk pengembangan organisasi akan lebih mudah dan efektif.

F. *Stakeholders*

Stakeholders menurut Freeman adalah individu atau kelompok yang dapat memengaruhi, atau dipengaruhi oleh, tindakan dan hasil dari suatu organisasi (Fairuza dkk, 2017: 9). Definisi ini dapat diartikan secara luas sehingga siapa pun atau kelompok apa pun dapat dilihat sebagai pemangku kepentingan perusahaan.

Oleh karena itu, teori pemangku kepentingan biasanya mempersempit definisi pemangku kepentingan menjadi individu atau kelompok besar yang sah.

1.6.7 Analisis SWOT

Perumusan strategi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi organisasi secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk membantu mencari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Berikut penjelasan faktor yang akan dianalisis menurut David (2009: 47):

1. Kekuatan (strengths)

Kekuatan berkaitan dengan apa yang bisa ditawarkan dari pesaing yang ada sehingga kebutuhan yang diminta oleh pasar bisa dipenuhi oleh perusahaan.

2. Kelemahan (weakness)

Kelemahan berkaitan dengan segala hal yang menghambat aktivitas perusahaan bisa berupa keterbatasan fasilitas, sumber daya, atau kemampuan manajemen.

3. Peluang (opportunity)

Peluang berkaitan dengan kondisi yang memberi kesempatan perusahaan menghasilkan keuntungan. Banyak penyebab adanya kondisi tersebut, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang terjadi.

4. Ancaman (threats)

Ancaman berkaitan dengan kondisi tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kondisi tersebut mengganggu kedudukan perusahaan saat ini maupun kedudukan yang diinginkan ke depan.

1.6.8 Merumuskan Strategi

Strategi yang digunakan tidak akan lepas dari misi, tujuan, kebijakan yang dimiliki organisasi. Perencanaan strategi yang akan digunakan harus berdasarkan kondisi yang ada baik di dalam maupun luar organisasi. Hasil analisis SWOT bisa dikembangkan menjadi pilihan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dengan matriks TOWS. Matriks TOWS memberikan empat strategi yang berbeda tipe berasal dari perpaduan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi saat ini (Wheelen dan Hunger, 2012: 230).

Tabel 1.3 Matriks TOWS

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T

Sumber: David (2009:171)

Matriks SWOT memberi manajer pertimbangan dalam memilih strategi yang diinginkan.

- A. S-O strategi: Mengejar peluang dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki
- B. W-O strategi: Mengatasi kelemahan untuk mengejar peluang.
- C. S-T strategi: Menggunakan kekuatan untuk mengatasi/mengurangi dampak dari ancaman.
- D. W-T strategi: Menghilangkan atau mengurangi kelemahan agar tidak rentan terhadap ancaman.

Matriks TOWS menghasilkan beberapa strategi yang bisa digunakan namun harus dilakukan pemilihan strategi yang akan digunakan dengan pertimbangan memberi dampak signifikan dalam menyelesaikan permasalahan.

1.6.9 Sampah

Sampah menurut *World Health Organization* merupakan segala sesuatu yang berasal dari aktivitas yang dilakukan manusia kemudian sudah tidak berguna dan dibuang (waste4change.com). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dari kedua pengertian di atas sampah bisa diartikan sebagai semua buangan material sisa yang sudah tidak bermanfaat.

Pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan sifat dan jenis sampah yang ada. Sampah oleh Soemirat Slamet (2009) dibedakan atas dari sifat biologisnya, pertama sampah yang mudah membusuk contohnya sisa makanan dan sampah dari alam selanjutnya sampah yang berbahaya pada kesehatan seperti limbah industri (Malina dkk., 2017).

Sedangkan menurut Noelaka bahwa sampah dibagi menjadi tiga bagian (Utama dkk., 2022: 284):

1. Sampah organik

Jenis sampah ini berasal dari sampah yang mudah membusuk secara alami contohnya adalah sisa makanan, dedaunan, sampah dari perkebunan.

2. Sampah anorganik,

Jenis sampah ini berasal dari sampah yang sulit terurai tanpa proses, sampah anorganik berasal dari barang yang dibuat melalui proses teknologi seperti botol plastik, botol kaca, kaleng.

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun),

Sampah B3 umumnya berasal dari industri, jenis sampah ini memerlukan pengolahan khusus karena mengandung zat kimia berbahaya, sampah B3 umumnya berasal dari industri dalam mengelola terdapat tata cara yang sudah diatur oleh lembaga khusus.

Timbulan sampah terkumpul dari berbagai tempat, berikut penjelasan menurut Notoatmodjo dalam Kosassy dkk. (2021):

1. Sampah yang berasal dari pemukiman.

Pemukiman menghasilkan dua sampah, yaitu organik dan anorganik dari aktivitas rumah tangga. Sampah organik berasal dari daun, sisa makanan, dan sampah taman, sedangkan sampah anorganik yang dihasilkan berupa kertas, pakaian bekas, dan plastik.

2. Sampah yang berasal dari fasilitas umum.

Berbagai fasilitas umum seperti stasiun, terminal dan pasar menghasilkan sampah bermacam-macam mulai dari daun, botol kaca, plastik, dan kertas.

3. Sampah yang berasal dari perkantoran.

Umumnya merupakan sampah anorganik seperti kertas berasal dari berbagai bidang baik kantor pendidikan, perdagangan, bagian dari perusahaan dan lainnya.

4. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah yang timbul dari aktivitas membersihkan jalan, sampah yang dihasilkan bermacam-macam jenisnya.

5. Sampah yang berasal dari industri.

Sampah yang dihasilkan biasanya merupakan sisa barang dalam suatu tahap produksi, contohnya sisa kain, kertas, kayu dan sebagainya.

6. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan.

Sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik yang mudah terurai seperti daun, sisa tanaman yang mati, atau hasil perkebunan itu sendiri..

7. Sampah yang berasal dari pertambangan.

Contoh sampah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan adalah batu, pasir, tanah, sisa tahap produksi dan sebagainya.

8. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan.

Sumber sampah dari tempat ini biasanya adalah sisa makanan, kotoran ternak, dan hewan ternak yang mati.

1.6.10 Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan dari awal hingga akhir yang selalu berkaitan dengan tujuan mengelola sampah (waste management). Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 mendefinisikan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berikut isi dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tersebut:

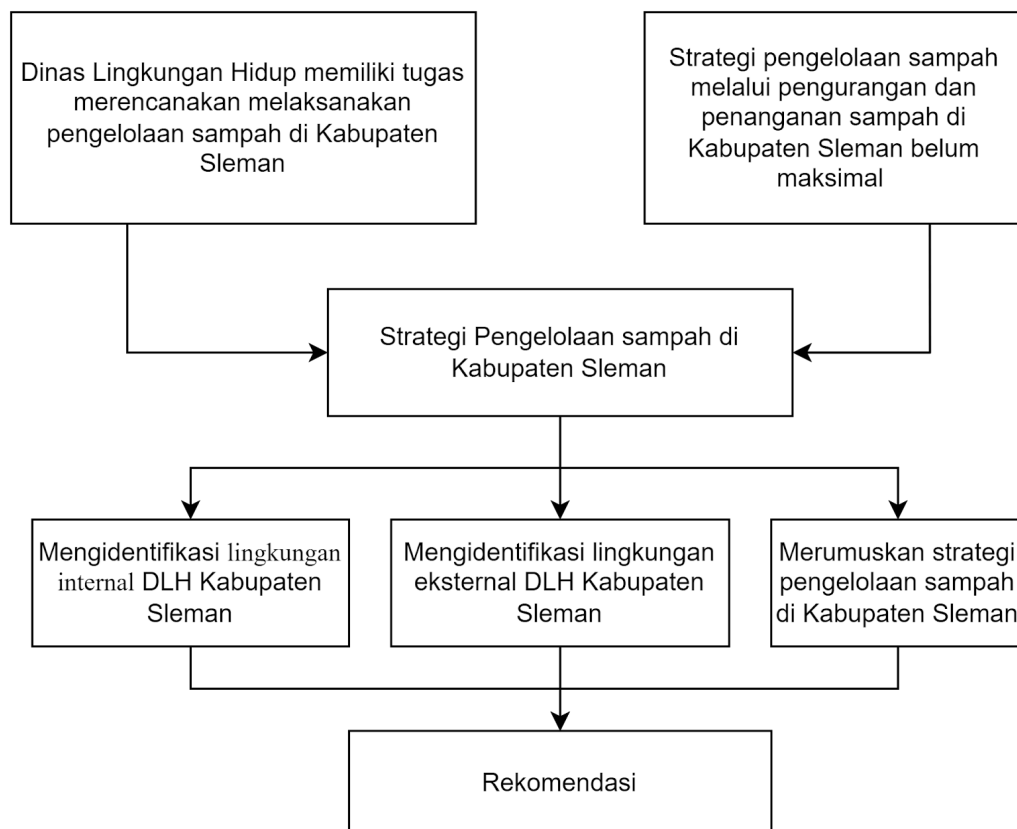
A. Pengurangan sampah

Serangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mengurangi sampah baik dari sumber sampah, pada tempat pengelolaan, atau menggunakan kembali sampah.

B. Penanganan sampah

Serangkaian upaya penyortiran sampah sesuai ketentuan yang ada kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke tahap selanjutnya hingga menuju ke tempat pemrosesan terakhir. Didalamnya juga terdapat pengolahan yang bertujuan merubah karakteristik, komposisi, jumlah sampah sehingga bisa dikembalikan ke alam secara aman.

1.6.11 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Telah diolah kembali

1.7 Fenomena Penelitian

Strategi pengelolaan sampah merupakan suatu upaya untuk mengelola sampah di Kabupaten Sleman dengan cara melakukan serangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Fenomena pada penelitian ini berkaitan dengan perumusan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dengan tahapan sebagai berikut:

A. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berkaitan dengan unsur-unsur yang berasal dari dalam organisasi yang dapat berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dari suatu organisasi.

A. Visi dan misi organisasi

Visi berisikan mengenai cita-cita dan harapan bagi suatu organisasi, sementara misi merupakan cara guna mewujudkan visi organisasi. Indikator visi dan misi dapat dilihat melalui visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam mendukung pengelolaan sampah sesuai peraturan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia berkaitan dengan tugas individu pada suatu lembaga. Sumber daya manusia berkaitan dengan kuantitas dan kualitasnya serta bentuk koordinasi dan kerja samanya. Indikator SDM dapat dilihat melalui:

1. Kualifikasi pendidikan para pegawai bidang pengelolaan sampah
2. Kuantitas pegawai bidang pengelolaan sampah

C. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan berbagai fasilitas pada kawasan wisata dalam memenuhi indikator kenyamanan pengunjung. Indikator sarana dan prasarana dapat dilihat melalui:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
2. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah

D. Anggaran/dana

Anggaran dana berkaitan erat perencanaan dana atau keuangan yang akan digunakan dalam melakukan pengembangan yang disusun secara sistematis.

Indikator anggaran dana dapat dilihat melalui:

1. Ketersediaan dana anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
2. Ketersediaan dana anggaran untuk pengembangan strategi pengelolaan sampah
3. Ketersediaan dana anggaran untuk pelatihan SDM bidang pengelolaan sampah

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal berkaitan dengan unsur-unsur yang berasal dari luar organisasi yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats), di mana unsur ini cenderung sulit untuk dikendalikan dan memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan.

A. Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Sleman yang memiliki pengaruh pada strategi pengelolaan sampah. Indikator ekonomi dapat dilihat melalui:

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman
2. Pandangan masyarakat pada sampah yang bisa dimanfaatkan kembali

B. Politik

Politik berkaitan dengan pengaruh situasi politik terhadap strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Indikator politik dapat dilihat melalui:

1. *Political will* kepala daerah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah
2. Payung hukum yang melandasi pengelolaan sampah

C. Sosial budaya

Sosial budaya berkaitan dengan kehidupan sosial serta budaya yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Sleman. Indikator sosial budaya dapat dilihat melalui:

1. Pandangan masyarakat pada sampah
2. Nilai budaya yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan

D. Partisipasi dari masyarakat

Partisipasi masyarakat berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Indikator partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui:

1. Pemilahan sampah sesuai jenisnya

2. Keberadaan bank sampah di lingkungan sekitar

E. Teknologi

Teknologi berkaitan dengan pembaruan sistem pengelolaan sampah berupa alat pengelolaan yang terbaru dan komunikasi dalam menyebarluaskan sosialisasi tentang sampah. Indikator teknologi dapat dilihat melalui:

1. Alat pengelolaan sampah dengan teknologi
2. Adanya sosialisasi pengelolaan sampah melalui media sosial

F. *Stakeholders*

Stakeholders berkaitan dengan peran dari berbagai pihak dalam melakukan pengelolaan sampah. Indikator *stakeholders* dapat dilihat melalui adanya kerja sama dalam pengelolaan sampah.

C. Perumusan isu strategis

Hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang kemudian diidentifikasi menggunakan SWOT agar dapat dilakukan perumusan strategi yang tepat. Identifikasi isu strategis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT berisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada pengelolaan sampah. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi isu melalui tes litmus, pada perumusan dituliskan isu yang memiliki sifat strategis karena memiliki nilai tinggi pada semua aspek.

Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

Fokus Penelitian	Sub Gejala	Daftar Pertanyaan
Analisis Lingkungan Internal	Visi dan misi organisasi	1) Visi dan misi DLH Kabupaten Sleman sudah mendukung pengelolaan sampah sesuai peraturan? 2) Bagaimana komitmen DLH pada misi yang telah

		ditetapkan pada pengelolaan sampah? 3) Bagaimana strategi pengelolaan sampah yang sudah dijalankan? 4) Bagaimana keberlangsungan strategi tersebut?
	Sumber Daya Manusia (SDM)	5) Bagaimana kondisi SDM pada pengelolaan sampah, apakah sudah memenuhi secara kualitas dan kuantitas? 6) Bagaimana pembagian tugas pengelolaan sampah yang dilakukan? 7) Bagaimana cara DLH meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan sampah yang ada?
	Sarana dan prasarana	8) Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada saat ini? 9) Bagaimana cara melakukan koordinasi pada bagian ini? Apakah terdapat tim khusus?
	Anggaran/dana	10) Bagaimana perencanaan yang dilakukan, apakah jumlah anggaran yang didapat sudah cukup untuk menjalankan semua program pengelolaan sampah?
Analisis Lingkungan Eksternal	Ekonomi	11) Bagaimana pandangan masyarakat pada sampah yang bisa dimanfaatkan kembali?
	Politik	12) Bagaimana keberpihakan puncak pimpinan pada pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan? 13) Bagaimana ketersediaan payung hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman?
	Sosial budaya	14) Bagaimana pandangan masyarakat pada sampah? 15) Bagaimana budaya lokal mempengaruhi pengelolaan sampah?
	Partisipasi dari masyarakat	16) Bagaimana Tingkat keterjangkauan masyarakat pada KSM/bank sampah? 17) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah?
	Teknologi	18) Bagaimana upaya untuk menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan sampah? 19) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengajak masyarakat peduli pada sampah melalui sosial media? 19) Bagaimana upaya DLH Kabupaten Sleman

		memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan sampah?
	<i>Stakeholders</i>	20) Bagaimana upaya penegakkan peraturan untuk setiap <i>stakeholders</i> pengelolaan sampah? 21) Bagaimana pandangan DLH pada <i>stakeholders</i> lain dalam pengelolaan sampah? 22) Bagaimana upaya kerja sama dengan pihak lain dalam mendorong pengelolaan sampah yang baik?
		23) Bagaimana cara menentukan visi misi pengelolaan sampah di Kabupaten sleman? 24) Bagaimana tujuan pengelolaan sampah yang ingin dicapai Kabupaten sleman? 25) Bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang ada?
Strategi	Identifikasi isu-isu strategis	25) Bagaimana DLH menyusun perencanaan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten sleman? 26) Bagaimana cara memutuskan strategi yang akan digunakan dalam pengelolaan sampah?
	Perumusan Strategi	27) Bagaimana DLH menuangkan strategi yang dipilih pada peraturan?

Sumber: Telah diolah kembali

1.8 Argumen Penelitian

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman belum optimal jika melihat jumlah potensi pertumbuhan sampah dengan jumlah sampah yang sudah dikelola. Besarnya volume sampah yang mengalir menuju TPA Piyungan menandakan masih tergantungnya Kabupaten Sleman pada sistem lama tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Kondisi TPA Piyungan yang sudah penuh mengakibatkan seringnya penutupan baik oleh pengelola atau warga, hal tersebut kemudian menimbulkan efek pada hal-hal lain yang ada di masyarakat. Penutupan menimbulkan perilaku pembuangan sampah sembarangan di masyarakat yang

kemudian berujung terjadinya konflik horizontal. DLH merupakan wakil pemerintah yang harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang ada. Strategi yang sudah dijalankan harus ditinjau ulang dengan segera untuk dapat menghasilkan strategi baru yang lebih efisien. Permasalahan pengelolaan sampah yang dibiarkan akan menjadi melebar dan menyebabkan permasalahan lainnya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dilakukan dengan cara ilmiah dengan tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Penelitian ini dilihat dari sudut bentuknya merupakan penelitian preskriptif. Bentuk penelitian preskriptif menurut Soerjono Soekanto menggambarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan kemudian memberikan saran pada permasalahan yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini (Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2020: 26).

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada lembaga pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki keterkaitan dengan keberjalanan sebuah penelitian, dalam menentukan subjek penelitian harus dilakukan dengan cermat karena berkaitan dalam pengumpulan informasi serta data di lapangan yang

dibutuhkan. Pada penelitian ini dalam penentuan subjek penelitiannya menggunakan *purposive sampling*, yaitu penyeleksian informan yang akan dijadikan subjek atau dengan pertimbangan tertentu. Penentuan subjek penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan mencari informan yang sesuai dengan permasalahan terkait pada topik penelitian. Adapun kategori informan yang sesuai dengan kriteria penelitian adalah:

- 1) Memiliki informasi lengkap tentang fokus penelitian
- 2) terlibat secara langsung pada permasalahan yang akan diteliti
- 3) terdampak secara langsung dari permasalahan yang akan diteliti

Informan pihak internal pada penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sleman, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD, dan tenaga kerja lapangan. Sedangkan dari pihak eksternal, yaitu penyedia layanan angkut sampah dan masyarakat yang terdampak.

1.9.4 Jenis Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif, oleh karena itu tulisan ini berisi kata-kata dan tidak banyak mengandung angka. Data yang ada digunakan sebagai kalimat penjelas dan tangkapan apa yang ada di lokasi. Cara memperoleh data untuk penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

1.9.5 Sumber Data

Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer didapatkan langsung oleh peneliti dari wawancara dengan informan yang sesuai kriteria, observasi di lapangan, dan dokumentasi saat wawancara dan observasi dilakukan.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui buku, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian membutuhkan data agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan, oleh karena itu teknik yang digunakan menjadi krusial (Sugiyono, 2016: 224). Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain. Cara tersebut dilakukan dengan tujuan menemukan permasalahan secara terbuka dan agar pertanyaan wawancara dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti saat melakukan wawancara. Pemberian jawaban oleh narasumber atau informan biasanya akan mampu menimbulkan berbagai pertanyaan lain saat wawancara tengah berjalan, hal ini dapat memunculkan jawaban yang lebih detail dari narasumber.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan jenis observasi partisipan dan observasi sistematis, di mana peneliti turut serta mengambil bagian dari pengamatan serta menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan sehingga peneliti dapat memperoleh data terpercaya secara langsung berdasarkan fakta lapangan. Observasi yang dilakukan ini digunakan peneliti untuk mengetahui aktivitas, kondisi dan situasi pada pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sleman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pencatatan adanya peristiwa atau aktivitas dengan berbagai cara. Saat ini terdapat berbagai macam cara dalam mendokumentasikan peristiwa, dokumentasi bisa berupa foto, rekaman, dan catatan yang ada. Teknik ini biasanya dilakukan pada awal waktu penelitian dilakukan

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Semua data sudah terkumpul dari berbagai narasumber yang diperlukan kemudian dianalisis untuk memastikan kebenarannya. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah didapatkan kemudian disusun dengan deskripsi yang sistematis. Langkah terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan analisis SWOT karena dianggap bisa mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan mengambil peluang yang ada bersamaan dengan memperkecil kelemahan dan ancaman yang teridentifikasi.

Tabel 1.5 Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	STRENGTHS (S) (KEKUATAN)	WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN)
	Mengidentifikasi beberapa faktor yang berkaitan dengan kekuatan internal.	Mengidentifikasi beberapa faktor yang berkaitan dengan kelemahan internal.
OPPORTUNITIES (PELUANG)	S-O (KEKUATAN DAN PELUANG)	W-O (KELEMAHAN DAN PELUANG)
Mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat menjadi peluang.	Mengidentifikasi kekuatan yang dapat dijadikan peluang dalam organisasi.	Mengidentifikasi kelemahan yang dapat dijadikan peluang.
THREATS (ANCAMAN)	S-T (ANCAMAN DAN KEKUATAN)	W-T (KELEMAHAN DAN ANCAMAN)
Mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat menjadi ancaman.	Mengidentifikasi ancaman yang dapat dijadikan kekuatan.	Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman yang timbul.

Sumber: David (2009)

Hasil analisis yang didapatkan kemudian harus dilakukan identifikasi agar didapatkan isu yang bersifat strategis. Penelitian ini menggunakan uji litmus dalam mendapatkan isu bersifat strategi dan bisa digunakan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

Pedoman Uji Litmus

Uji litmus menurut Bryson (2016: 185) digunakan dalam mengukur isu yang ada sehingga bisa didapatkan beberapa sifat dari isu yang ada. Skor tinggi yang didapatkan dari semua dimensi menghasilkan isu yang bersifat strategi sebaliknya skor yang rendah memiliki sifat operasional.

Klasifikasi nilai pada tiap-tiap jawaban dalam uji litmus ialah seperti ini:

- Isu yang bersifat Operasional: Skor 1
- Isu yang bersifat Moderat: Skor 2
- Isu yang bersifat Strategis: Skor 3

Adapun rentang skor untuk mengurutkan isu-isu tersebut:

- Rentang skor 1-13: Bersifat operasional
- Rentang skor 14-26: Bersifat moderat
- Rentang skor 27-39: Bersifat strategis

Tabel 1.6 Pedoman Uji Litmus (Litmus Test)

No	Pertanyaan	Operasional-Strategis		
		-1	-2	-3
1	Kapan tantangan atau peluang isu-isu strategis terjadi?	Sekarang	Tahun depan	2 tahun atau lebih, dari sekarang
2	Seberapa luas isu akan berpengaruh?	Unit atau divisi tunggal	Beberapa bagian	Keseluruhan
3	Seberapa banyak risiko keuangan/peluang keuangan yang akan dihadapi?	Kecil (< dari 10% anggaran)	Sedang (10-25% dari anggaran)	Besar (> 25% anggaran)
4	Akankan strategi pada pemecahan isu akan memerlukan:			
	Pengembangan sasaran dan program pelayanan baru?	Tidak		Ya
	Perubahan signifikan dalam sumber-sumber atau jumlah pajak?	Tidak		Ya
	Perubahan signifikan	Tidak		Ya

	dalam ketetapan atau peraturan federal atau negara bagian? Penambahan atau modifikasi fasilitas utama? Penambahan staf signifikan?	Tidak Tidak		Ya Ya
5	Bagaimana pendekatan yang terbaik bagi pemecahan isu?	Jelas, siap diimplementasikan	Parameter luas, agak terperinci	Terbuka luas
6	Tingkat manajemen terendah mana yang dapat menetapkan penanggulangan isu?	Pengawas staf lini	Kepala divisi	Kepala departemen
7	Konsekuensi apa yang mungkin terjadi apabila isu tidak diselesaikan?	Ada gangguan, inefisiensi	Kekacauan pelayanan, kehilangan sumber daya	Kekacauan pelayanan jangka panjang dan biaya besar/ merosotnya penghasilan.
8	Seberapa banyak bagian lain akan berpengaruh dan harus dilibatkan dalam pemecahan?	Tidak ada	1-3	4 atau lebih
9	Bagaimana sensitivitas isu tersebut terhadap nilai-nilai sosial, politik, religius, atau kultural komunitas?	Lunak	Sedang	Keras

Sumber: Bryson (2016:185)

1.9.8 Kualitas Data

Validitas data bisa didapatkan dengan mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi disampaikan oleh wijaya sebagai cara pemeriksaan data yang didapat dengan berbeda sumber, berbeda cara, dan berbeda waktu (Wijaya, 2018: 120-121). Berikut penjelasan cara memastikan kebenaran data dalam penelitian ini:

1. Triangulasi Sumber

Validitas data didapatkan dengan cara menarik data dari sumber yang berbeda kemudian dibandingkan satu dengan lainnya. Peneliti akan melakukan perbandingan data dari lima informan yang diwawancarai.

2. Triangulasi Teknik

Validitas data didapatkan dengan cara menarik data menggunakan beberapa teknik yang berbeda. Peneliti akan melakukan perbandingan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda.